

Kerjasama Pertahanan Indonesia-Ukraine: *dari (R)UU Ratifikasi ke implementasi*¹

Kusnanto Anggoro

Secara teknis, draft RUU Ratifikasi Kerjasama Pertahanan Indonesia-Ukraine cukup layak untuk diratifikasi. Draft memberi perlindungan dalam berbagai aspek, mulai dari dispute settlement, hak cipta intelektual, maupun kerahasiaan informasi yang termasuk dalam lingkup kerjasama. Secara substantif, draft RUU tidak lebih dari sekedar mengukuhkan praktek kerjasama pertahanan antara kedua negara yang telah dilakukan selama ini lebih dari 4 (empat) tahun. Berdasarkan MoU (2016) itu pula, beberapa hari yang silam, PT Pindad menandatangani kerjasama dengan Praktica, sebuah perusahaan Ukraine yang memproduksi kendaraan tempur. Pada penandatanganan MoU itu, kedua negara menandatangani juga kesepakatan kerjasama di bidang lain, termasuk di bidang perdagangan, pendidikan dan latihan diplomat, dan bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

Diplomasi pertahanan

Diplomasi pertahanan (dan diplomasi militer) tampaknya masih akan memainkan peranan penting dalam kebijakan/strategi pertahanan Indonesia. Di luar kemampuan konvensional untuk menghadapi perang tradisional, termasuk ketidakstabilan militer di Asia Pasifik, seperti sering ditunjukkan oleh Global Fire Power, Indonesia sebenarnya tidak cukup memiliki kemampuan yang memadai terutama dalam menghadapi peperangan modern (modern warfare) yang hampir dipastikan akan banyak mengandung non-conventionality, senjata-senjata modern, dan yang bisa terjadi sekalipun tanpa deklarasi perang (baca: accidental, un-intentional war) dengan negara-negara tertentu.

Tabel di bawah menunjukkan lemahnya kemampuan itu. Indonesia tidak memiliki signature capability dan lebih lemah dibanding beberapa negara dibidang jejaring pertahanan (defence network). Selain tidak cukup membangun kerjasama pertahanan bilateral, khususnya yang secara tradisional sering ditafsirkan sebagai aliansi militer, kemampuan pertahanan Indonesia terlalu mengandalkan pada unsur-unsur kekuatan (force elements) dalam perang tradisional. Indonesia dinilai tidak cukup memiliki kemampuan dalam unsur peperangan modern seperti rudal/roket, kemampuan siber, ataupun sistem tanpa awak (unmanned vehicles). Sebagian dari kemampuan seperti itu merupakan salah satu keunggulan negara-negara pasca-Soviet, khususnya Serbia, Ukraine dan Polandia.

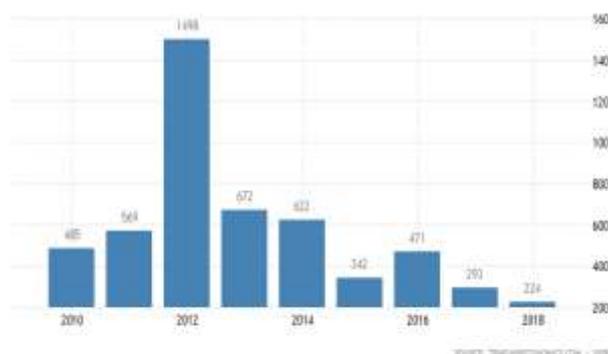
¹ Disampaikan pada RDP tentang "RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Ukraine mengenai Kerjasama dalam bidang Pertahanan", Komisi I, DPR RI, 18 Februari 2020.

	Econ resrces	Econ Rltns	Mil capability	Defence network	Diplom influence	Cultur inflnce	Resilience	Future trends
Australia	10.8	25.6	24.9	69.7	62.6	22.4	77.8	3.2
China	91.3	94.9	69.9	24.7	89.4	49.5	85.9	83.0
India	26.8	22.9	48.9	23.2	72.5	42.9	65.2	55.6
Indonesia	10.5	10.2	14.9	18.5	46.2	13.8	62.0	11.7
Japan	32.9	57.1	26.9	46.1	82.0	40.8	53.4	8.8
Korea, So	17.0	25.5	29.2	51.1	60.6	25.0	47.0	5.6
Malaysia	8.2	20.5	10.5	33.4	37.1	24.5	54.9	2.6
Philippines	5.8	8.9	4.1	22.6	30.3	10.9	32.2	4.0
Singapore	14.8	44.5	22.3	40.6	51.1	17.7	37.0	1.4
Thailand	8.5	20.2	10.8	24.2	37.7	21.3	49.1	3.5
U States	91.7	64.5	94.6	89.6	83.8	93.9	91.4	60.0
Vietnam	5.0	13.4	16.3	13.0	40.5	13.6	42.9	3.7

Karena itu dapat dimengerti jika ada niat yang amat kuat untuk mengembangkan diplomasi pertahanan itu, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini. Ratifikasi UU terkait dengan kerjasama pertahanan meningkat 300% dalam lima tahun terakhir ini (2015-2019) dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (2010-2015). Dalam kurun waktu tersebut diratifikasi berbagai undang-undang kerjasama pertahanan, antara lain dengan Spanyol, Serbia, Belarusia, Russia (2019), Thailand, Korea Selatan, Belanda, dan Arab Saudi (2018). Papua Nugini (2017), Polandia, Vietnam, Jerman, China (2016), Timor Leste dan Pakistan (2015) dan Turki (2014), serta Brunei Darusalam (2010). Meskipun demikian, struktur kemitraan kerjasama bilateral tidak berubah secara signifikan. Kerjasama-kerjasama bilateral ini dilakukan paling banyak dengan negara-negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Rusia dan negara-negara pasca-Soviet Eropa Timur, serta China, belum menggeser titik berat kerjasama-kerjasama bilateral itu.

Potensi kerjasama pertahanan Indonesia-Ukraine

Ukraine menempati peringkat 8-10 eksportir senjata dalam beberapa tahun belakangan ini, lebih tinggi dibanding beberaa negara, termasuk Korea Selatan, Nederland, Turki dan Belarusia. Meskipun demikian, tampaknya industri pertahanan Ukraine memang sedang dilanda sejumlah tantangan. Perubahan politik domestik maupun pertikaian dengan Rusia (tentang Krimea) dalam beberapa tahun ini membawa konsekuensi luar biasa, khususnya merosotnya nilai ekspor senjata Ukraine (Lihat tabel di bawah). Sumbangan sektor industri pertahanan bagi GDP Ukraine tidak lebih dari 1,5% saja. Ukraine menyumbang sekitar 1.5 – 3 % saja dari ekspor persenjataan global (bandingkan dengan Amerika 33%, Russia 25%, Perancis 5.6%, atau China 5.59%).



Menjadi pertanyaan apakah hal ini berarti Ukraine akan memberi berbagai kemudahan bagi rekanan-rekanan barunya. Sebagai negara anggota NATO, dan terutama yang belakangan ini menjadi mitra strategis Amerika, tentu tidak mudah untuk memenuhi harapan itu. Dalam 5-10 tahun ke depan, tidak mustahil kerjasama pertahanan, khususnya untuk pengembangan alutsista akan terkendala berbagai soal, khususnya sentralisasi yang amat kuat di konsorsium industri pertahanan Ukraine – selain persoalan transparansi dan akuntabilitas yang masih menjadi masalah besar di negara-negara pasca-Soviet.

Tentu, sebagai bekas bagian dari negara-negara Soviet, Ukraine masih mewarisi kemampuan tinggi di bidang senjata-senjata nuklir, kendaraan tempur, senjata elektromagnetik, dan pesawat terbang (sipil maupun militer). Lebih dari itu Ukraine layak diperhitungkan dari berbagai aspek, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan terkait dengan pengembangan sistem senjata (Lihat tabel di bawah). Pengalaman Ukraine dalam “perang” dengan Russia selama 4 tahun belakangan ini juga telah memberi Ukraine kemajuan yang signifikan dibidang peperangan elektronik (electronic warfare). Seperti terlihat dari tabel di bawah, perbedaan kemampuan antara Indonesia dan Ukraine tidak terlalu tinggi, kecuali di bidang pengetahuan dan teknologi serta human capital dan penelitian – sehingga dalam batas-batas tertentu mempermudah penyesuaian antara keduanya, jika diperlukan.

	Human Cap n research	Knwldge n Techno	Technol ogy Index	Cyber Security	Global Compt Index	GPI	EDB
China	47.6	57.2	3.72	0.28	73.9	0.0691	31
Rusia	48.3	27.1	3.65	0.836	66.7	0.0681	28
Belarusia	41.6	25.5	n.a.	0.578	n.a.	0.8179	49
Polandia	41.2	30.9	4.19	0.815	68.9	0.3397	40
Ukraine	35.6	34.6	3.15	0.661	57.0	0.4450	64
Turki	36.3	23.0	4.01	0.853	62.1	0.2098	33
So Korea	66.5	50.2	n.a.	0.873	79.6	0.1509	5
Jerman	63.2	52.7	5,08	0.859	81.8	0.2186	22
Belanda	52.4	61.8	4.98	0.885	82.4	0.5919	42
Spanyol	47.0	37.2	4.86	0.896	75.3	0.3388	30
AS	55.7	59.7	6.24	0.926	83.7	0.0606	16
Indonesia	33.9	17.6	3.31	0.776	54.6	0.2544	73

Catatan penutup

Undang-undang kerjasama pertahanan/militer bilateral bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan meningkatnya intensitas kerjasama-kerjasama pertahanan bilateral. Dalam praktek intensitas kerjasama pertahanan itu relatif independen dari ada/atau tidaknya UU. Bisa jadi, hal itu untuk sebagian disebabkan karena memang pada umumnya UU tidak lebih dari sekedar mengukuhkan hubungan yang semula didasarkan pada memorandum of understanding yang pada prinsipnya sudah mengatur lingkup kerjasama antar negara. Dari 16 UU kerjasama pertahanan bilateral yang diratifikasi tidak mudah menemukan perubahan yang signifikan dari MoU menjadi UU.

UU merupakan landasan legal untuk menyusun kebijakan pemerintah (dan dengan demikian juga orientasi dan lingkup pengawasan oleh DPR RI). Lingkup kerjasama pertahanan Indonesia-Ukraine seperti tercantum dalam RUU (seperti tercantum dalam pasal 2 draft RUU) dapat menjadi pijakan bagi DPRRI untuk membangun kontrol yang lebih efektif baik dalam kaitan dengan aktivisme pemerintah

Indonesia untuk memanfaatkan UU itu dalam membangun kerjasama pertahanan bilateral maupun untuk menilai efektifitas kerjasama itu bagi pengembangan sistem pertahanan Indonesia. Pengalaman Ukraine dari pertikaianya dengan Rusia dalam 4 tahun belakangan ini, misalnya, tidak mustahil bermanfaat untuk modernisasi doktrin/strategi han(kam)rata yang lebih relevan dengan tantangan masa depan. Kedua negara dapat saling berbagi pengalaman – meski kemungkinan tidak terjadi arus posisif yang terlalu besar di bidang itu mengingat “cognitive dissonance” di kedua belah pihak.

Pasal 2 (butir 1 dan 2) dapat dioperasionalisasikan lebih jauh untuk memberi DPR RI instrumen kontrol yang lebih terukur dalam berbagai bidang kerjasama sehingga kebijakan pertahanan Indonesia benar-benar merupakan pro-kreasi antara pemerintah dan DPR RI. Bisajadi, hal itu memang merupakan persoalan teknis. Namun perlu diingat bahwa dalam banyak kasus, kekurangsigapan Indonesia terletak pada operasinalisasi substansi menjadi topik-topik kerjasama teknis. Adalah tidak cukup, misalnya, sekedar menilai apakah “pengembangan kerjasama militer teknis” (seperti tercantum dalam pasal 2.1.2) betul-betul dilaksanakan, tetapi apakah pengembangan itu relevan dengan kebutuhan Indonesia. Menurut perkiraan awal, kerjasama teknis di bidang rudal/roket, operational tactics menghadapi hybrid war, kedokteran militer merupakan bidang-bidang yang perlu menjadi prioritas.

Selected reference:

Competitiveness and Private Sector Development Ukraine Sector Competitiveness Strategy, OECD dan SIDA (Tanpa tahun)

de Albuquerque, Adriana Lins and Jakob Hedenskog Ukraine A Defence Sector Reform Assessment. Försvarsmakten/Swedish Armed Forces, December 2018

Gerasymchuk, Sergiy. The Image of the Democratic Soldier: Tensions Between the Organisation of Armed Forces and the Principles of Democracy in European Comparison“ Funded by the Volkswagen Foundation 2006-2009, PRIF- Research Paper No. II/7-2008

"Ukroboronprom Represents Latest Drones "Phantom" and "Gorlvtsa" to NSDC Secretary of Ukraine" (Press release). *Ukroboronprom*. 29 August 2016. Retrieved 2 September 2016.

"Ukraine now has a unique processing line for the production of missile bodies". *en.ukrmilitary.com*. Retrieved 2018-01-09.